ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SI) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Oleh :

AGUSTRI YOGI HIDAYAT

2015/15060070

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Nama	**: Agustri Yogi Hidayat**
NIM/TM	**: 15060070/2015**
Jurusan	**: Ilmu Ekonomi**
Keahlian	**: Ekonomi Perencanaan**
Fakultas	**: Ekonomi**

Padang, Juni 2021

Disetujui oleh :	**Diketahui oleh :**
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi	**Pembimbing**
Melti Roza Adry, SE. ME	**Drs. Zul Azhar M. Si**
NIP. 19830505 200604 001	**NIP. 19590805 198503 1006**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Nama	: Agustri Yogi Hidayat
NIM/TM	: 15060070/2015
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Keahlian	: Ekonomi Perencanaan
Fakultas	: Ekonomi

Padang, Maret 2021

Tim Penguji :

No	Jabatan		Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	:	Drs. Zul Azhar, M.Si	1.
2	Anggota	:	Drs. Ali Anis, Ms	2.
3	Anggota	:	Mike Triani, S.E,M.M	3.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Agustri Yogi Hidayat
NIM/Tahun Masuk	: 15060070/2015
Tempat/Tanggal Lahir	: Baso/21 Agustus 1996
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Keahlian	: Ekonomi Perencanaan
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Jambak Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam
No.Hp/Telepon	: 0813-7416-6944
Judul Skripsi	: Analisis Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerim **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karna karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 22 Maret 2021

Yang menyatakan

AGUSTRI YOGI HIDAYAT

NIM : 15060070

ABSTRAK

Agustri Yogi Hidayat (2015/15060070) : Analisis Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur tehadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, dengan Dosen Pembimbing Drs. Zul Azhar M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia, (2) pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia, (3) pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap kemiskinan di Indonesia. Jenis Peneltian yang digunakan adalah deskriptif dan asosiatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2017 sampai dengan 2019 di Indonesia dengan menggunakan data panel dengan pendekatan OLS *(Ordinary Least Square)*. Dengan melakukan beberapa uji yaitu uji chow, uji haustmant, uji hipotesis, dan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah di sector kesehatan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan probabilitas sebesar 0,9476. Indeks. Pengeluaran pemerintah di sector pendidikan berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan probabilitas sebesar 0,0030. Indeks. Pengeluaran pemerintah di sector infrastruktur berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan probabilitas sebesar 0,5756. Indeks.

Kata Kunci : Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kemiskinan

ABSTRACT

Agustri Yogi Hidayat (2015/15060070): Analysis of Government Expenditure in the Health, Education, and Infrastructure Sector on Poverty Levels in Indonesia. Department of Economics, Faculty of Economics, Padang State University, with Supervisor Drs. Zul Azhar M. Si

This study aims to determine: (1) the effect of government spending on the health sector on poverty in Indonesia, (2) the effect of government spending on the education sector on poverty in Indonesia, (3) the effect of government spending on the infrastructure sector on poverty in Indonesia. The type of research used is descriptive and associative.

The data used in this study are secondary data from 2017 to 2019 in Indonesia using panel data with the OLS (Ordinary Least Square) approach. By doing several tests, namely the chow test, haustmant test, hypothesis test, and classical assumption test.

The results of this study indicate that government spending in the health sector has a negative and insignificant effect on poverty in Indonesia with a probability of 0.9476. Index. Government spending in the education sector has a significant negative effect on poverty in Indonesia with a probability of 0.0030. Index. Government spending in the infrastructure sector has a positive and insignificant effect on poverty in Indonesia with a probability of 0.5756 index.

Keywords: Health, Education, Infrastructure, Poverty

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT Rabb semesta alam karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Analisis Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur tehadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia".** Penulisan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan, sehingga bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis untuk menjadi lebih baik dikemudian hari.Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis serta pihak-pihak terkait lainnya.

Selama berproses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik saya di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Dewi Zaini Putri, S.E, MM selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.

4. Orang tua yang telah memberikan motivasi kepada penulis baik materi dan moril dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan IE 15 dan seluruh pihak yang telah ikut memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak atau pembaca yang telah membaca skripsi ini untuk kesempurnaan tulisan ini dimasa yang akan datang

Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT membalas kebaikan dari semua pihak.

Padang, Januari 2021

Agustri Yogi Hidayat
Nim. 15060070

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan Penelitian 15
D. Manfaat Penelitian 16
BAB II **18**
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS **18**
A. Kajian Teori 18
1. Teori Kemiskinan 18
2. Defenisi Kemiskinan 20
3. Penyebab Kemiskinan 23
4. Pengeluaran Pemerintah 25
B. Penelitian Terdahulu 35
C. Kerangka Konseptual 36
D. Hipotesis 39
BAB III **40**
METODE PENELITIAN **40**
A. Jenis Penelitian 40
B. Tempat dan Waktu Penelitian 40
C. Jenis Data dan Sumber Data 40
D. Teknik Pengumpulan Data 41
E. Definisi Operasional 41
F. Teknik Analisis Data 42

1. Analisis Deskriptif 42
2. Analisis Induktif 42
3. Uji Asumsi Klasik 47
4. Uji Hipotesis 50
BAB IV 53
HASIL DAN PEMBAHASAN 53
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 53
1. Kondisi Geografis Indonesia 53
2. Kondisi Penduduk Indonesia 54
B. Hasil Penelitian 54
1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 54
2. Hasil Uji Analisis data Penelitian 63
3. Uji Hipotesis 68
4. Uji Asumsi Klasik 70
C. Pembahasan 73
1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2017-2019 73
2. Analisis Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2017-2019 76
3. Analisis Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Indonesia 80
BAB V 83
PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN 88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2019 4
Tabel 1.2 Pengeluaran di Bidang Kesehatan dalam Realisasi Belanja APBD Indonesia Tahun 2017-2019 (Rupiah) 7
Tabel 1.3 Pengeluaran di Bidang Pendidikan dalam Realisasi Belanja APBD Indonesia Tahun 2017-2019 (Rupiah) 10
Tabel 1.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Tahun 2017-2019 14
Tabel 4.1 Jumlah Persentase Penduduk Miskin setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019 (Rupiah) 55
Tabel 4.2 Jumlah Persentase Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019 (Rupiah) 57
Tabel 4.3 Jumlah Persentase Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019 (Rupiah) 60
Tabel 4.4 Jumlah Persentase Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019 (Rupiah) 62
Tabel 4.5 Rata-rata pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan kemiskinan di Indonesia tahun 2017-2019 63
Tabel 4.6 Hasil Uji Chow 65
Tabel 4.7. Hasil Uji Hausmant 66
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Random Effect 67
Table 4.9. Hasil Uji Multikolinieritas 71
Tabel 4.10. Hasil Uji Heteroskedasitas 72
Tabel 4.11. Hasil Uji Autokorelasi 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan di Indonesia 37

Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas 71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2019 88
Lampiran 2. Data Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Infrstruktur dalam Realisasi Belanja APBD Indonesia Tahun 2017-2019 (Rupiah) 89
Lampiran 3. Hasil Olah Data Tahun 2020 Mengunakan Eviews 9 93

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pemerintah nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada akhirnya akan menghasilkan kesejeahteraan. Salah satu sasarananya tentu menurunkan angka kemiskinan yang akan menimbulkan dampak negatif yang dapat berpengaruh pada pembangunan ekonomi. Selain itu, perkembangan kondisi kemiskinan di suatu negara secara ekonomis merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan adalah kegagalan untuk memenuhi standar hidup yang rendah yang juga ditandai dengan jumlah gaji yang terbatas, kekurangan tempat tinggal, administrasi kesehatan dan kelemahan kronis, rendahnya tingkat pendidikan negara, menyebabkan rendahnya SDM dan tingginya pengangguran, sebagaimana ditunjukkan oleh Mudrajat. Kuncoro (2006). Tingkat harapan akan kenyamanan sehari-hari di suatu negara dapat diperkirakan dari beberapa penanda, termasuk Barang Publik Bruto (GNP) per kapita, pembangunan publik relatif dan pembayaran per kapita, penyampaian gaji publik, tingkat kemiskinan, dan tingkat pemerintahan daerah.

Gagasan yang menyinggung garis kemiskinan disebut kemiskinan total, sedangkan gagasan yang perkiraannya tidak bergantung pada garis kemiskinan disebut kebutuhan relatif. Kemiskinan tertinggi adalah tingkat kebutuhan di bawahnya, di mana kebutuhan dasar untuk ketahanan tidak dapat dipenuhi, kebutuhan relatif adalah proporsi lubang dalam sirkulasi gaji, biasanya itu cenderung dicirikan sejauh tingkat normal penyebaran. dimaksud, Kuncoro (2006).

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi pada negara-negara dunia ketiga. Kemiskinan ditandai dengan keterbelakangan dan ketertinggalan, rendahnya produktivitas dan rendahnya pendapatan yang diterima, keterbatasan akses dan kemampuan serta kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan, Azhar (2019).

Mengingat ide-ide yang disusun menjelang awal yayasan, ada beberapa kontras dan persamaan hipotetis sehubungan dengan ide tentang kebutuhan. Secara eksperimental, sebagaimana ditunjukkan oleh Widodo (2011), bahwa alokasi belanja pemerintah daerah tidak secara langsung mempengaruhi daftar peningkatan manusia (IPM) atau kemiskinan, namun sementara (pada saat yang sama), penggunaan ruang publik dan sumber daya manusia. catatan kemajuan dapat mempengaruhi kebutuhan. Artinya, belanja administrasi di bidang kesejahteraan dan sekolah tidak bisa dibiarkan begitu saja sebagai variabel otonom dalam mempengaruhi kemiskinan, namun harus dikolaborasikan dengan berbagai faktor, misalnya faktor dasar negara.

Di sisi lain pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur terhadap kemiskinan baik secara nasional maupun provinsi terus meningkat setiap tahun. Namun secara pasti apakah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan tersebut dapat menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan belum diketahui. Karena peranan pemerintah terhadap kemiskinan mempunyai efek yang sangat besar.

Pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam Rencana Keuangan Negara (APBN) merupakan salah satu perangkat pengaturan moneter otoritas publik. Otoritas publik dapat memanfaatkannya untuk menangani perekonomian negara. Rencana keuangan negara dalam perbaikannya telah melalui berbagai perubahan primer. Pengeluaran status saat ini menggunakan pameran yang disusun berdasarkan rencana keuangan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2004. Sejak tahun 1969 kerangka yang wajar dan dinamis telah dijalankan dalam penyusunan rencana Pendapatan dan Belanja Konsumsi Negara.

Pengeluaran pemerintah, yang biasa dikenal pengeluaran negara, terdiri dari rencana keuangan pemerintah pusat, aset penyesuaian, dan aset independensi luar biasa dan cadangan penyesuaian. Rencana keuangan pemerintah pusat dibagi menjadi konsumsi rutin dan penggunaan perbaikan sebelum proklamasi UU no. 17/2003. UU No. 17/2003 menyajikan kerangka pengeluaran yang terikat bersama sehingga sampai saat ini mungkin tidak ada kualifikasi antara penggunaan rutin dan penggunaan perbaikan.

Adapun penelitian ini ingin lebih membahas masalah kemiskinan secara keseluruhan yang ada di Indonesia, karna dalam masalah kemiskinan perlunya di teliti secara baik dan tepat sasaran tentunya, baik tingkat lokal

ataupun nasional, dengan demikian pemecahan masalah kemiskinan akan teratasi dengan baik.

Untuk mengetahui perkembangan kemiskinan yang ada di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2019

No	POROVINSI	Persentase (%)		
		2017	2018	2019
1	ACEH	15.92	15.68	15,32
2	SUMATERA UTARA	9.28	8.94	8,83
3	SUMATERA BARAT	6.75	6.55	6,42
4	RIAU	7.41	7.21	7,08
5	JAMBI	7.90	7.85	7,6
6	SUMATERA SELATAN	13.10	12.82	12,71
7	BENGKULU	15.59	15.41	15,23
8	LAMPUNG	13.04	13.01	12,62
9	KEP. BANGKA BELITUNG	5.30	4.77	4,62
10	KEP. RIAU	6.13	5.83	5,9
11	DKI JAKARTA	3.78	3.55	3,47
12	JAWA BARAT	7.83	7.25	6,91
13	JAWA TENGAH	12.23	11.19	10,8
14	DI YOGYAKARTA	12.36	11.81	11,7
15	JAWA TIMUR	11.20	10.85	10,37
16	BANTEN	5.59	5.25	5,09
17	BALI	4.14	3.91	3,79
18	NUSA TENGGARA BARAT	15.05	14.63	14,56
19	NUSA TENGGARA TIMUR	21.38	21.03	21,09
20	KALIMANTAN BARAT	7.86	7.37	7,49
21	KALIMANTAN TENGAH	5.26	5.10	4,98
22	KALIMANTAN SELATAN	4.70	4.65	4,55
23	KALIMANTAN TIMUR	6.08	6.06	5,94
24	KALIMANTAN UTARA	6.96	6.86	6,63
25	SULAWESI UTARA	7.90	7.59	7,66
26	SULAWESI TENGAH	14.22	13.69	13,48
27	SULAWESI SELATAN	9.48	8.87	8.69
28	SULAWESI TENGGARA	11.97	11.32	11,24
29	GORONTALO	17.14	15.83	15,52
30	SULAWESI BARAT	11.18	11.22	11,02
31	MALUKU	18.29	17.85	17,69
32	MALUKU UTARA	6.44	6.62	6,77
33	PAPUA BARAT	23.12	22.66	22,17

34	PAPUA	27.76	27.43	27,53
35	INDONESIA	10.12	9.66	9,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tiap Provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi dalam persentase penduduk miskin di Indonesia. Dapat dilihat persentase kemiskinan tertinggi dari tahun 2017-2019 terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu 10,12 % secara nasional. Penyebabnya ialah karna naiknya harga komoditi kebutuhan bahan pokok dibandingkan dengan komoditi bukan makanan, seperti beras, ayam ras, cabai, gula pasir, mie instan, rokok dan lain-lain. Krisis harga beras di awal tahun 2017 juga berpengaruh besar pada peningkatan jumlah penduduk miskin, oleh karena itu mengkonsumsi beragam pangan adalah solusi terbaik dalam mengatasi kemiskinan. Menurut 33 provinsi di Indonesia kemiskinan tertinggi terdapat pada tahun 2017 berturut-turut pada wilayah Papua sebesar 27,76 %. Hal terbesar penyebab kemiskinan di Papua diantaranya korupsi yang masih meraja rela, sehingga pemerintah masih sulit untuk mengembangkan daerah tersebut, dimana dengan ketertinggalannya semuanya menjadi sulit terlaksana.

Dari tahun 2017-2019 tingkat kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2019 dengan persentase kemiskinan 9,41 %. Penurunan ini terjadi secara bertahap dengan upaya Pemerintah menstabilkan sejumlah komoditas-komoditas yang merupakan penyumbang terbesar kemiskinan saat ini. Fluktuasi kemiskinan di setiap provinsi disebabkan oleh berbagai faktor baik

itu dari kesehatn, pendidikan, dan bisa juga dikarenakan infrastruktur yg kurang memadai.

Selanjutnya tingkat kemiskinan terendah dari 33 provinsi pada tahun 2017-2019 terjadi pada tahun 2019 pada provinsi DKI Jakarta dengan persentase 3,47 %. Pengeluaran pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan. Pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran sebagai penggerak utama perekonomian. Sehingga ketika perekonomian mengalami kesulitan akibat adanya resesi ekonomi, pemerintah melalui instrumen kebijakan dapat menyelamatkan keadaan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah melalui anggaran belanjanya.

Salah satu faktor yang diambil pencipta dalam ujian ini adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, oleh karena itu kesejahteraan merupakan hak setiap penduduk yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Pengembangan lebih lanjut administrasi kesejahteraan pada dasarnya merupakan kepentingan SDM untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tingkat kesejahteraan umum akan sangat mempengaruhi tingkat bantuan pemerintah daerah, karena tingkat kesejahteraan memiliki hubungan yang baik dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kebutuhan akan diidentifikasi dengan tingkat bantuan pemerintah. Dengan demikian, kesejahteraan merupakan faktor fundamental yang perlu diakui oleh otoritas publik, sehingga kesejahteraan harus menjadi kekhawatiran utama otoritas publik sebagai organisasi spesialis publik.

Otoritas publik juga harus memiliki pilihan untuk memastikan hak wilayah lokal untuk menjadi sehat dengan memberikan administrasi kesejahteraan yang wajar, tidak memihak, cukup, moderat dan berkualitas. Selanjutnya adalah rencana keuangan konsumsi otoritas publik untuk bidang kesejahteraan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Pengeluaran di Bidang Kesehatan dalam Realisasi Belanja APBD Indonesia Tahun 2017-2019 (Rupiah)

Provinsi	2017	2018	2019
Aceh	1.811.622.160.009	1.902.151.830.386	1.839.798.395.581
Sumatera Utara	495.387.487.458	557.226.429.957	578.525.156.664
Sumatera Barat	563.935.281.785	669.677.595.419	836.606.685.638
Riau	1.026.178.784.890	759.568.127.586	1.107.333.354.138
Jambi	857.218.014.066	458.273.201.779	445.685.721.296
Sumatera Selatan	491.541.735.598	433.162.595.007	374.434.092.100
Bengkulu	416.493.742.755	349.072.290.080	371.526.829.142
Lampung	574.633.548.360	558.079.906.148	729.021.569.880
Kep. Bangka Belitung	248.789.142.306	240.080.235.970	293.661.732.862
Kep. Riau	267.476.655.238	301.404.806.331	289.904.825.930
Jawa Barat	9.604.886.843.981	8.872.887.546.250	13.336.207.073.665
Jawa Tengah	9.056.059.492	9.021.673.396	2.522.484.880.000
Yogyakarta	147.059.223.018	148.141.282.237	170.682.790.293
Jawa Timur	12.343.343.324.086	12.538.921.484.729	4.415.102.455.915
Banten	519.534.901.000	359.527.919.540	539.425.695.000
Bali	2.787.956.642.322	1.713.454.109.927	609.414.773.009
Nusa Tenggara Barat	1.023.392.196.280	530.902.920.457	646.654.770.500
Nusa Tenggara Timur	334.854.149.000	304.167.139.114	321.189.371.000
Kalimantan Barat	501.315.865.500	427.642.058.201	463.207.210.300
Kalimantan Tengah	368.852.574.917	450.399.524.460	424.077.563.427
Kalimantan Selatan	962.581.619.698	165.612.041.058	1.013.162.319.263
Kalimantan Timur	1.117.982.376.000	1.062.222.341.475	1.120.415.115.750
Kalimantan Utara	285.486.019.307	305.246.405.989	237.930.645.813
Sulawesi Utara	255.129.507.211	268.129.779.385	807.362.295.400
Sulawesi Tengah	361.213.598.059	399.658.024.958	471.314.109.498
Sulawesi Selatan	601.639.940.029	675.874.762.015	763.197.642.985
Sulawesi Tenggara	266.783.291.109	290.801.499.566	301.067.016.525
Gorontalo	151.427.047.754	122.720.451.488	142.772.711.314
Sulawesi Barat	243.804.690.120	163.264.929.844	189.265.866.961

Maluku	313.777.000	245.407.698.958	247.388.677.391
Maluku Utara	244.266.885.470	195.022.598.190	228.853.816.000
Papua Barat	216.387.664.532	111.213.333.847	248.906.611.486
Papua	1.194.477.130.000	764.659.560.096	5,837,535,057,447
Indonesia	92.400.000.000.000	107.400.000.000.000	123.100.000.000.000

Sumber :*Kementrian keuangan 2019*

Pada Tabel 1.2 menunjukan bahwa pengeluaran dalam bidang kesehatan berfluktuasi disetiap provinsi di Indonesia. Pengeluaran pemerintah secara nasional terbesar pada tahun 2019 dan yang terendah secara nasional pada tahun 2017. Dalam hal ini Pemerintah sangat memperhatikan sektor kesehatan, dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah yang meningkat setiap tahunnya. Menurut 33 Provinsi pengeluaran di bidang kesehatan dari tahun 2017-2019 terbesar terdapat pada provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Hal ini di sebabkan karena jumlah penduduk di Jawa Timur padat, oleh karena itu menyebabkan tingginya jumlah pengeluaran kesehatan. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan biaya kesehatan paling kecil pada 2017-2019 terjadi pada provinsi Maluku pada tahun 2017 jumlah penduduknya sedikit.

Seperti kesejahteraan, pengajaran adalah jenis minat dalam SDM. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat kemiskinan karena sekolah adalah salah satu segmen utama dalam lingkaran kebutuhan yang tak ada habisnya. Salah satu pendekatan untuk mengalahkan ini adalah melalui bekerja pada sifat instruksi. Administrasi pelatihan yang didanai negara paling dasar adalah instruksi penting, yang diubah oleh otoritas publik menjadi program wajib sekolah sembilan tahun. Otoritas publik perlu menjamin bahwa semua anak muda dapat bersekolah, sehingga diperlukan

alokasi belanja instruksi yang sangat besar. Kewajiban otoritas publik untuk kemajuan instruksi tercermin dalam rencana belanja sekolah yang diberikan dalam APBN.

Pengeluaran pemerintah di bidang pengajaran tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa "cadangan pengajaran selain tarif gaji guru dan biaya sekolah resmi dialokasikan paling sedikit 20% dari rencana Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pelatihan. daerah dan paling sedikit 20% dari APBD".

Menurut Mangkoesoebroto (2001), pengeluaran pemerintah mencerminkan pendekatan pemerintah. Otoritas publik yang menentukan pendekatan tertentu memiliki hasil biaya yang harus dibawa. Pengeluaran-pengeluaran ini didukung dari pengeluaran otoritas publik yang menjadi penggunaan otoritas publik. Rencana keuangan yang dialokasikan untuk suatu daerah menunjukkan kewajiban otoritas publik untuk masalah di bidang itu. Namun, dalam mempengaruhi kebutuhan ada hal lain, yaitu belanja pemerintah khusus di bidang persekolahan. Pengeluaran pemerintah di bidang instruksi adalah kepentingan dalam kebutuhan. Dampak dari konsumsi tersebut tidak dapat memberikan efek yang cepat, namun memerlukan beberapa waktu untuk dapat merasakan efeknya. Untuk mengetahui perkembangan rencana keuangan badan publik di bidang pelatihan dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3

Pengeluaran di Bidang Pendidikan dalam Realisasi Belanja APBD Indonesia Tahun 2017-2019 (Rupiah)

Provinsi	2017	2018	2019
Aceh	3.559.083.831.224	3.780.310.005.375	4.753.589.584.823
Sumatera Utara	1.241.427.779.109	5.336.167.433.275	6.208.045.888.624
Sumatera Barat	1.922.225.470.120	2.182.818.460.905	2.383.684.581.894
Riau	3.157.985.464.347	982.434.844.347	3.358.733.073.081
Jambi	1.385.111.285.409	1.506.133.286.332	1.678.905.995.302
Sumatera Selatan	1.597.164.563.529	1.757.782.760.397	1.841.167.290.000
Bengkulu	679.960.492.933	789.389.814.684	813.881.241.651
Lampung	2.530.950.211.148	2.712.583.880.570	3.012.444.698.277
Kep. Bangka Belitung	671.380.942.258	722.342.444.686	842.219.797.555
Kep. Riau	959.555.462.809	1,259,157,244,193.00	1.112.552.777.626
Jawa Barat	7.979.213.931.850	13.429.466.749.281	14.079.848.855.599
Jawa Tengah	5.203.799.968.923	6.028.745.371.546	11.938.528.076.000
Yogyakarta	1.461.431.757.060	1.542.408.871.057	2.217.151.942.617
Jawa Timur	9.894.461.026.595	9.746.816.818.902	11.871.159.932.550
Banten	3.329.905.016.767	3.603.844.398.496	4.380.039.615.243
Bali	1.836.536.360.587	1.850.030.037.854	2.057.372.883.326
Nusa Tenggara Barat	1.841.069.417.716	1.853.325.435.909	2.057.670.827.105
Nusa Tenggara Timur	2.180.848.598.468	2.269.988.686.612	2.970.607.655.626
Kalimantan Barat	1.759.503.539.576	1.766.701.113.680	2.175.857.217.957
Kalimantan Tengah	1.171.983.207.948	1.228.399.096.351	1.559.141.220.965
Kalimantan Selatan	2.067.141.597.358	508.789.988.359	2.213.221.001.887
Kalimantan Timur	1.671.269.947.938	1.648.675.269.838	2.301.643.410.675
Kalimantan Utara	434.501.447.386	497.694.865.991	447.366.776.450
Sulawesi Utara	1.317.868.991.968	1.316.851.992.613	3,789,672,139,864
Sulawesi Tengah	1.286.840.398.332	1.273.605.248.145	1.608.148.847.822
Sulawesi Selatan	3.868.223.675.733	3.949.948.846.038	4.149.589.830.340
Sulawesi Tenggara	1.359.514.590.014	1.483.242.539.070	1.195.526.469.800
Gorontalo	600.299.750.487	619.597.641.895	665.133.617.306
Sulawesi Barat	504.109.689.583	360.090.508.262	457.954.069.161
Maluku	1.228.554.307.643	1.436.887.466.372	860.910.784.099
Maluku Utara	706.711.783.648	761.207.159.500	943.556.776.000
Papua Barat	763.169.350.694	948.856.829.177	2.764.899.757.948
Papua	2.476.780.543.192	3.456.123.157.662	3.441.164.632.512
Indonesia	406.100.000.000.000	434.600.000.000.000	492.500.000.000.000

Sumber: Kementrian Keuangan, 2019

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan mengalami fluktuasi, dimana pengeluaran tertinggi dari tahun 2017-2019 secara nasional terjadi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2017. Dalam hal ini disebabkan oleh besarnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dalam pendidikan dengan menaikan anggaran setiap tahunnya diiringi dengan perkembangan era. Dari 33 provinsi di indonesia yang tertinggi dari tahun 2017-2019 adalah provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 dan 2019, salah satu penyebabnya karena padat dan bertambah banyaknya jumlah penduduk di provinsi Jawa Barat, dan yang terentah setiap tahunnya adalah Kalimantan Utara, penyebabnya karena rendahnya mutu pendidikan dan kurang memenuhi standar nasional pendidikan dikutip dari Kompas.com. Namun jika diliat dari Indoesia secara keseluruhan pengeluaran memerintah di bidang pendidikan meningkat setiap tahunnya.

Pada tabel 1.3 pemerintah terus meningkatakn jumlah investasinya pada sektor pendidikan dari tahun ke tahun, artinya pemerintah sangat berkomitmen untuk meningkatkan sektor pendidikan yang akan memberikan dampak sangat besar untuk negara. Pengadaan pendidikan bukan hanya kewajiban pemerintah saja, akan tetapi peran masyarakat diwajibkan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, serta sadar akan pentingnya pendidikan. Sehingga sinegritas antara pemerintah dan warga negara harus dilaksanakan. Karena di era saat ini pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan dan jenjang untuk melangkah ke tahap selanjutnya, sehingga tidak ada

masyarakat yang menganggur dan tidak mendapatkan pekerjaan sehingga meningkatnya angka kemiskinan.

Sementara itu pada sektor infrastruktur juga merupakan syarat untuk penggerak dalam perekonomian demi mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebagai penggerak perekonomian sudah pasti infrastruktur memiliki peran penting guna meningkatnya kesejahteraan masyarakat agar tidak terjerumus kepada faktor kemiskinan. Sehingga infrastruktur menjadi elemen penting bagi pemerintah.

Dalam penelitian lain, (Patriotika, 2011) menemukan bahwa infrastruktur merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan produktifitas. Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negri lemah, itu berarti bahwa perekenomian negara tersebut berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi, berujung pada perusahaan dan bisnis yang kurangnya daya saing (karena biaya bisnis yang tinggi). Belum lagi dengan munculnya ketidakadilan sosial misalnya, sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, atau susahnya anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanannya terlalu jauh atau mahal.

Infrastruktur merupakan *input* penting bagi kegiatan produksi dan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara lansung maupun tidak lansung. Infrastruktur juga sangat mempengaruhi untuk kesempatan kerja pada masyarakat sehingga dapat menggurangi

pengangguran dan kemiskinan. Berikut anggran pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur.

Tabel 1.4
Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Tahun 2017-2019

Provinsi	2017	2018	2019
Aceh	2.491.753.488.147	2.178.184.903.034	1.838.191.444.395
Sumatera Utara	1.368.995.493.798	680.215.556.542	1.810.684.168.973
Sumatera Barat	2.010.047.541.474	707.593.169.448	592.618.680.013
Riau	3.170.628.525.798	1.702.562.021.591	2.078.095.530.070
Jambi	774.177.569.486	843.626.327.853	1.793.279.250.951
Sumatera Selatan	1.607.912.936.805	619.024.429.407	1.640.166.126.357
Bengkulu	416.358.729.802	291.548.020.829	857.785.436.008
Lampung	986.547.183.412	960.202.744.466	987.622.739.120
Kep.Bangka Belitung	159.839.518.122	285.048.931.854	293.000.459.563
Kep. Riau	548.859.331.932	420.725.007.462	380.827.287.424
Jawa Barat	1.249.026.584.053	964.396.738.428	1.727.962.727.311
Jawa Tengah	2.520.452.747.000	573.674.945.835	405.937.301.500
Yogyakarta	320.865.130.424	331.308.292.495	91.715.230.143
Jawa Timur	1.898.082.687.810	878.718.988.485	1.295.887.087.821
Banten	1.966.127.800.000	1.189.816.035.727	1.265.136.442.504
Bali	778.015.585.971	1.693.722.665	461.756.688.828
Nusa Tenggara Barat	523.255.845.051	126.788.994.971	1.825.740.360.525
Nusa Tenggara Timur	391.085.151.000	159.050.722.328	340.848.257.500
Kalimantan Barat	215.989.419.150	658.919.889.153	925.873.605.100
Kalimantan Tengah	161.679.819.201	122.328.651.345	646.007.798.726
Kalimantan Selatan	657.702.435.000	994.176.797.079	436.831.065.500
Kalimantan Timur	1.580.623.722.571	214.461.902.177	847.044.110.000
Kalimantan Utara	590.776.761.831	755.596.530.196	885.207.306.362
Sulawesi Utara	513.180.146.623	101.257.534.441	393.514.766.884
Sulawesi Tengah	419.300.351.396	474.395.910.207	292.991.111.082
Sulawesi Selatan	125.946.608.400	585.313.470.924	629.989.180.960
Sulawesi Tenggara	471.454.603.325,	500.921.931.026	465.051.395.900
Gorontalo	219.172.873.816	183.465.913.473	247.196.612.547
Sulawesi Barat	93.402.718.386	231.410.899.967	253.229.584.991
Maluku	531.145.956.295	729.674.171.497	435.893.636.756
Maluku Utara	366.272.567.018	164.149.599.893	525.136.277.267
Papua Barat	982.098.270.000	667.490.968.476	884.373.776.525
Papua	1.810.513.643.000	235.260.095.414	2.503.227.333.000
Indonesia	**379.400.000.000.000**	**410.400.000.000.000**	**420.500.000.000.000**

Sumber: Kementrian Keuangan, 2019

Pada tabel 1.4 pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penaikan secara nasional. Karena sasaran pemerintah untuk pembangunan jalan baru, tol dan jembatan yang membutuhkan dana setiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah yang tertinggi pada 33 provinsi adalah Riau pada tahun 2017 karena pengembangan kawasan permukiman yang sangat banyak. Selanjutnya pengeluaran pemerintah terendah pada 33 provinsi yaitu pada provinsi Bali pada tahun 2018 karena mengingat Bali masih memungkinkan dalam sektor infrastruktur. Secara nasional pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur tertinggi dari tahun 2017-2019 adalah pada tahun 2019 dan selalu meningkat setiap tahunnya.

Pemerintah sebagai pemain utama dalam penyedian infrastruktur telah menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasioanal, sehingga infrastruktur dapat dipenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu perlu pendekatan yang lebih terpadu dalam pembangunan infrastruktur guna menjamin sinergi antar sektor dan wilayah (Bulohlabna, 2008:14).

Dibandingkan ketiga sektor pengeluaran pemerintah tersebut, pengeluaran sektor infrastruktur memiliki anggran yang paling tinggi dan selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini menandakan tingginya perhatian pemerintah terhadap sektor infrastruktur. Namun tidak dapat dipungkiri kalau secara keseluruhan pengeluaran pemerintah untuk fungsi kemiskinan,

kesehtan dan pendidikan di Indonesia sangat diperlukan guna untuk kesejahteraan masyarakat sehingga jauh dari kemiskinan. Namun dalam hal ini anggaran yang dikondisikan pemerintah di Indonesia tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemiskinan.

Dari paparan di atas penulis tertarik untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Analisis Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan di Indonesia".**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan kemiskinan di Indonesia adalah berkaitan dengan naiknya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan serta infrastruktur yang meningkat setiap tahunnya apakah bisa memberikan efek yang besar terhadap penurunan persentase penduduk miskin atau bahkan sebaliknya. Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan di teliti adalah:

1. Apa dampak pengeluaran pemerintah di bidang kesejahteraan terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Apa dampak pengeluaran pemerintah untuk instruksi kemiskinan di Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kerangka kemiskinan di Indonesia?

4. Apa dampak pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan, instruksi dan kerangka kerja terhadap kemiskinan di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Membedah dampak pengeluaran pemerintah di bidang kesejahteraan terhadap kebutuhan di Indonesia.
2. Membedah dampak pengeluaran pemerintah untuk sekolah terhadap kebutuhan di Indonesia.
3. Membedah dampak pengeluaran pemerintah terhadap yayasan terhadap kebutuhan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Efek samping dari pemeriksaan ini diperlukan untuk memberikan keuntungan dan pekerjaan yang menyertainya:

1. Keuntungan Hipotetis
   A. Efek samping dari pemeriksaan ini diperlukan untuk berkontribusi dalam memperluas informasi.
   B. Menjadi referensi untuk eksplorasi tambahan, terutama untuk penelitian tentang kebutuhan.
2. Keuntungan yang Layak
   A. Untuk analis

      Terapkan informasi yang diperoleh selama alamat. Analis menjadi sadar akan dampak pengeluaran pemerintah di beberapa bidang terhadap kebutuhan di Indonesia.

B. Untuk pembuat strategi

Sebagai instrumen penilaian yang telah dilakukan dan memberikan data kepada otoritas publik dalam memutuskan data untuk menentukan ukuran pengeluaran pemerintah dalam kerangka waktu berikutnya.

BAB II
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Kemiskinan

Berbicara tentang masalah kemelaratan, tidak akan lepas dari hipotesis-hipotesis yang biasanya mengklarifikasi masalah ini. Seperti yang dikemukakan oleh Michael Sherraden, hipotesis kebutuhan dapat dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu hipotesis jalan hidup kemiskinan, hipotesis primer, dan hipotesis perilaku manusia. Hal ini juga praktis seperti yang dikomunikasikan oleh Sameti, Rahim, dan Hasan bahwa ada tiga faktor yang mengacaukan kebutuhan, khususnya elemen sosial yang buruk, komponen yang mendasari, dan variabel individu.

Hipotesis budaya tak berdaya diklarifikasi oleh Oscar Lewis yang berpendapat bahwa orang miskin akan tetap miskin karena mereka terbiasa dengan perilaku orang miskin di mana mereka belajar bagaimana menjadi lesu, tidak efisien, tidak visioner, dan dia juga mengatakan bahwa kebutuhan itu berlalu. turun dari satu zaman ke zaman lainnya karena anak-anak dididik dengan nilai-nilai. selanjutnya, tujuan kebutuhan. Ini menyiratkan bahwa setiap orang yang hidup dalam iklim yang tidak berdaya tidak merasakan kebutuhan yang harus ditanggungnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merasa baik-baik saja dengan kondisi mereka saat ini dan tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan kehidupan mereka lebih jauh meskipun untuk otoritas publik kondisi orang miskin adalah sesuatu yang harus segera berhasil.

Selain itu, hipotesis yang berbicara tentang kebutuhan adalah hipotesis yang mendasari. Hipotesis ini menyatakan bahwa kemelaratan disebabkan oleh tuntutan hidup yang menyusahkan bagi daerah setempat karena memenuhi kebutuhan dan tidak memperoleh penerimaan terhadap dinamika. Sebagaimana ditunjukkan oleh Marx, perkumpulan yang berfungsi (helpless gathering) memiliki kualitas hidup yang rendah karena penyalahgunaan para pengusaha dan buruh mengalami keterasingan dari diri mereka sendiri, dari barang-barang yang dikirim, dari individu-individu, dan dijauhkan dari siklus penciptaan.

Sesuai Michael Sherraden, hipotesis tunggal berbicara tentang perilaku manusia untuk menyelesaikan keputusan, inspirasi, mentalitas, dan sumber daya manusia. Hipotesis, yang bergantung pada hipotesis moneter gaya lama, juga mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena keputusan individu. Neediness terjadi sebagai akibat dari ketidakberdayaan masyarakat untuk bereaksi terhadap perubahan sosial yang terjadi di arena publik. Keyakinan pada kemandirian menyebabkan tingkat perilaku kerja yang sulit pada orang-orang yang tidak dapat disangkal dan perasaan kewajiban untuk memperoleh kebutuhan dasar. Jadi, manusia sendiri yang memutuskan apakah dia memutuskan untuk melepaskan diri dari kemiskinan atau bertahan dalam kondisi ini.

Sharp, et al (1996) in Kuncoro (2006) attempted to recognize neediness. In the first place, on a miniature level, destitution emerges due to disparity in asset possession which causes an inconsistent dissemination of pay. The poor have just restricted assets and bad quality. Second, neediness emerges because of contrasts in the nature of HR. Inferior quality of HR implies low efficiency, which thusly lower compensation. The bad quality of HR is because of low schooling, burdened destiny, separation or on account of heredity. Third, neediness emerges because of contrasts in admittance to capital.

These three reasons for destitution lead to the endless loop of neediness hypothesis. This hypothesis was found by Ragnar Nurkse (1953) in Kuncoro, 2004, who said: "a helpless nation is poor since it is poor". Underdevelopment, market defects, and absence of capital lead to low usefulness. Low efficiency brings about low pay they get. Low pay will have suggestions for low reserve funds and venture. Low speculation brings about underdevelopment. Thusly, every work to diminish destitution ought to be coordinated to cut the circle and this neediness trap (Kuncoro, 2006).

2. Defenisi Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana ada kegagalan untuk mengatasi masalah mendasar seperti makanan, pakaian, suaka, dan air minum. Hal ini secara tegas diidentikkan dengan kepuasan pribadi. Secara moneter, kemelaratan dapat dilihat dari tingkat tidak adanya

aset yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kehidupan dan bekerja pada bantuan pemerintah dari kumpulan individu.

Sesuai Chambers (1998) mengatakan bahwa kemiskinan adalah ide terkoordinasi yang memiliki lima ukuran, khususnya: 1. Kemiskinan (tepat), 2. Lemah, 3. Kelemahan untuk menghadapi keadaan krisis (situasi yang sangat sensitif), 4. Ketergantungan (ketergantungan).), dan 5. Pembatasan baik secara topografi maupun sosiologis. Kemiskinan bukan hanya ketiadaan uang atau tingkat upah yang rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti harta yang dibatasi, tingkat kesejahteraan yang rendah, pendidikan yang rendah, perlakuan hukum yang tidak pantas, kelemahan terhadap bahaya kejahatan, kelemahan. untuk menghadapi kekuatan, dan kelemahan dalam menentukan jalan mereka sendiri sepanjang kehidupan sehari-hari.

Menurut Lincolin Arsyad (1993), kemiskinan adalah ketiadaan modal. Ketiadaan modal ini dapat diklarifikasi dengan memanfaatkan gagasan lingkaran tanpa akhir. Ketiadaan modal ini disebabkan oleh usaha yang rendah, sedangkan spekulasi yang rendah disebabkan oleh upah yang rendah, sedangkan upah yang rendah disebabkan oleh tingkat efisiensi kerja yang rendah, aset dan modal yang normal. Rendahnya efisiensi tersebut disebabkan oleh keterbelakangan penduduk, aset yang normal belum dimanfaatkan secara ideal.

Jadi cenderung dianggap bahwa kemelaratan individu juga dapat disebabkan oleh variabel pendidikan individu tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, cenderung dirasakan bahwa kebutuhan sebenarnya adalah

ketiadaan persyaratan yang meliputi pakaian, makanan, suaka, dan pelatihan penting. Dengan tujuan bahwa gagasan tentang kebutuhan itu sendiri adalah akibat dari keadaan lemah untuk mengubah nasib hidupnya untuk memperbaiki keadaan. Selain itu, dengan tujuan akhir untuk mencapai kemajuan, ada beberapa faktor yang dijadikan tolak ukur seperti yang ditunjukkan oleh Human Advancement Record (HDI), antara lain; masa depan, tingkat pelatihan/tingkat kemahiran, dan kesetaraan daya beli.

Kemiskinan dapat dibagi dengan empat bentuk (Suryawati, 2005), yaitu:

1. Kemiskinan Absolut: Bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan Relatif: Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
3. Kemiskinan Kultural: Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan Struktural: Situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem

sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan.

3. Penyebab Kemiskinan

Menurut sumbernya, kemelaratan dapat dibagi menjadi kebutuhan sosial dan kebutuhan primer. Kemiskinan sosial adalah kemelaratan yang mengacu pada mentalitas individu atau masyarakat yang disebabkan oleh cara hidup, kecenderungan hidup, dan budaya mereka. Kemiskinan sosial umumnya digambarkan dengan perilaku orang atau kumpulan individu yang merasa tidak miskin terlepas dari apakah diperkirakan tergantung pada garis kemiskinan termasuk kelompok tak berdaya. Sementara itu, kebutuhan mendasar adalah kemelaratan yang disebabkan oleh struktur wilayah lokal yang tidak konsisten, baik karena kontras yang tidak konsisten dalam kepemilikan, kapasitas, gaji, dan lowongan kerja serta karena penyampaian perbaikan dan hasilnya yang tidak seimbang. Kemiskinan primer biasanya digambarkan oleh konstruksi sosial yang tidak konsisten, terutama sejauh ukuran moneter.

Kemiskinan tentunya merupakan masalah multidimensi yang mencakup berbagai bagian kehidupan. Kondisi kemiskinan pada dasarnya disebabkan oleh komponen-komponen yang menyertainya: Pertama, tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah mempengaruhi pembatasan dalam kemajuan diri dan keserbagunaan. Hal ini mempengaruhi kekuatan persaingan dalam merebut atau memasuki dunia kerja. Kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan dan rezeki berdampak pada rendahnya daya tahan

tubuh, daya pikir dan juga akan menurunkan dorongan. Ketiga, terbatasnya bukaan usaha semakin memperparah kebutuhan bahan bakar. Dengan bekerja pada dasarnya membuka peluang untuk mengubah nasibnya. Keempat, kondisi terbatas (jauh) menyebabkan administrasi terbuka seperti pengajaran, kesejahteraan, dan lain-lain tidak dapat menghubungi mereka. Kelima, kegentingan politik mempengaruhi kekecewaan dari strategi yang menguntungkan hingga strategi yang tidak berdaya. Berbagai pengaturan dan proyek untuk mengurangi kebutuhan akan menemui kesulitan dalam pelaksanaannya jika tidak didukung oleh kondisi politik yang stabil.

Alasan kemelaratan sebagaimana ditunjukkan oleh Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa alasan kemelaratan yang terjadi di negara-negara non-industri disebabkan oleh kolaborasi dari 6 kualitas berikut:

1. Tingkat pembayaran publik cukup rendah, dan laju perkembangan keuangan agak lesu.
2. Pendapatan per kapita negara-negara juga masih rendah dan perkembangannya sangat lamban, bahkan ada yang memburuk.
3. Sirkulasi gaji sangat tidak konsisten atau sangat tidak konsisten.
4. Sebagian besar penduduk di negara-negara agraris harus hidup di bawah faktor kebutuhan mendesak yang mendesak.
5. Kantor dan administrasi kesehatan yang buruk dan sangat terbatas, kesehatan yang sakit dan banyak episode penyakit sehingga tingkat kematian bayi beberapa kali lebih rendah daripada negara-negara berkembang.

6. Jabatan yang bersifat mendidik masih kurang penting atau kurang memadai.

Terlepas dari faktor-faktor di atas, menurut (Chriswardani, 2005) penyebab kemelaratan secara lokal, khususnya daerah pedesaan, disebabkan oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki, khususnya:

a. Sumber daya reguler: seperti tanah dan air, karena sebagian besar jaringan pedesaan hanya menguasai tanah yang tidak memadai untuk pekerjaan mereka
b. Sumber daya manusia: dalam hal sifat SDM yang masih cukup rendah dibandingkan dengan jaringan metropolitan (tingkat sekolah, informasi, kemampuan serta tingkat kesejahteraan dan otoritas inovasi.
c. Sumber daya aktual: tidak adanya izin masuk ke yayasan dan kantor publik, misalnya, organisasi jalanan, kekuasaan, dan korespondensi di wilayah pedesaan.
d. Sumber daya moneter: sebagai dana investasi, sama seperti masuk ke modal usaha.
e. Sumber daya sosial: sebagai organisasi, kontak dan dampak politik, untuk situasi ini kekuatan posisi yang berhadapan dalam menentukan pilihan politik.

4. Pengeluaran Pemerintah

Menurut pendekatan Keynes pada teori klasik bahwa meskipun tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian, ekonomi tetap

akan berjalan dengan maksimal, namun pada tahun 1930an terjadi pengangguran besar-besaran. Sehingga menimbulkan kritikan dari Keynes dengan menggunakan pendekatan dari segi makro dimana Keynes berfikir untuk mengurangi adanya pengangguran yaitu dengan melihat perekonomian secara keseluruhan. Jadi untuk mengatasinya, Keynes perlu menambahkan pengeluaran uang supaya pengusaha menaikkan investasinya yang akan menaikkan tenaga kerja. Dengan demikian diperlukan campur tangan pemerintah dengan mencetak uang maka akhirnya daya beli masyarakat bertambah dan respon pengusaha dalam menaikkan produksi.

Menurut Kuznets (dalam Jhingan, 2012:337), pemebentukan modal domestik tidak hanya mencakup biaya untuk konsumsi, peralatan dan persedian dalam negri, tetapi juga pada pengeluaran lain. Jadi istilah pembentukkan modal lebih luas lagi yaitu meliputi modal material dan modal manusia. Pembentukkan modal manusia ini dilakukan misalnya dilakukan pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai pendidikan dan pelatihan untuk pekerja sehingga meningkatkan pengetahuan dan keahlian pekerja, dengan meningkatnya kualitas pekerja maka produktivitas mereka juga akan meningkat pula.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penggunaan pemerintah Indonesia secara luas dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu penggunaan rutin yang pada dasarnya terdiri dari hal-hal konsumsi untuk mendukung pelaksanaan roda otoritas publik, termasuk penggunaan staf, penggunaan barang dagangan, sponsor, pemerintah. bagian

kewajiban dan penggunaan rutin lainnya. . Sementara itu, peningkatan konsumsi adalah penggunaan peningkatan modal publik sebagai dasar nyata, yang diakui dari kemajuan yang dibiayai oleh aset rupiah dan melakukan bantuan.

Menurut Sukirno (2000:38) pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran penggunaan pemerintah atau konsumsi pemerintah, yang termasuk konsumsi pemerintah adalah pembelian ke atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi seperti membayar gaji guru sekolah, membeli alat-alat kantor untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah dan yang *kedua* investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasaran seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi. Memberikan beasiswa, bantuan untuk korban banjir dan subsidi-subsidi pemerintah tidak digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah keatas produk nasional karena pengeluaran itu bukanlah untuk membeli barang dan jasa. (Sukirno 2000:38).

Menurut Bailey (2001) dalam penelitian lebih dalam tentang pertumbuhan pengeluaran pemerintah terdapat dua model yang menjelaskan pertumbuhan pengeluaran pemerintah yaitu mikro model dan makro model. Salah satu model makro adalah model pembangunan dimana model ini

menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan prasyarat dalam pertumbuhan ekonomi.

Mengingat semakin besarnya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa dimana pembelian tersebut merupakan suatu bentuk pengeluaran produk-produk akhir maka perkembangan selanjutnya dari model Keynes tersebut sebagai model penetu pendapatan nasional berubah menjadi Y= C + 1 + G, persamaan ini memasukkan pengeluaran pemerintah dalam analisis, dengan demikian maka komponen pengeluaran pemerintah dapat berubah tingkat pendapatan nasional dalam arti rill (Mankiw, 2000:57).

a. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah.

Di dalam buku karangan Marzuki Ilyas (1989:40) Sadono berpendapat bahwa factor bersifat social dan politik, serta ekonomi dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah, diantaranya :

1) Faktor ekonomi, yaitu factor yang memiliki hubungan dengan tujuan pencapaian pertunbuhan ekonomi secara menyeluruh dan pesat tanpa menimbulkan inflasi.

2) Faktor bersifat politik dan sosial, yaitu faktor yang menggunakan rancangan dana atau anggaran pengeluaran yang besar. Seperti bantuan social, usaha dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, serta kestabilan politik dan sebagainya.

b. Klarifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suparmoko (2012: 57) berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah bisa di klasifikasikan menjadi beberapa bagian, seperti dibawah ini : :

1) Pengeluaran yang *self liquiditing* seluruhnya atau sebagian, maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah mendapat balasan berupa jasa dari masyarakat penerima jasa atau produk bersangkutan.

2) Pengeluaran *reproduktif*, maksudnya adalah untuk mencapai keuntungan economic untuk masyarakat, dimana ketika tingkat penghasilan dan sasaran pajak lain maka dapat meningkatkan penerimaan pemerintah. Contohnya seperti ketika pemerintah menerapkan pajak *progresif* yang membuat munculnya *re-distribusi income* yang digunakan untuk anggaran pelayanan kesehatan masyarakat.

3) Pengeluaran *non-self liquiditing* ataupun yang tidak *produktif*, adalah yaitu pengeluaran dimana secara langsung dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. seperti pengeluaran pada bidang rekreasi, objek-objek wisata dan lain sebagainya. Oleh karena hal itu bisa juga meningkatkan penghasilan nasional yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut.

4) Pengeluaran langsung non-produktif, yang merupakan bentuk pemborosan. Contohnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk perang atau pertahanan, walaupun ketika pengeluaran berlangsung penghasilan penerimanya menjadi naik.

5) Pengeluaran penghematan untuk masa mendatang. Penegluaran tersebut seperti biaya yang dikeluarkan atau diberika kepada anak-anak yatim piatu. Apabila pengeluaran tersebut tidak dilangsungkan, maka kebutuhan pemeliharaan dan segala macam bentuk kebutuhan mereka akan lebih besar di masa mendatang.

Soediyono (1992: 20), mengatakan pengeluaran pemerintah dapat dibedakan berdasarkan pos pengeluaran pemerintah di APBN, diantaranya :

1) Pengeluaran berkala atau rutin,adalah biaya pengeluaran oleh pemerintah untuk diberikan kepada public seperti belanja staff, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan pemeliharaan.

2) Belanja infrastruktur atau npembangunan,yaitsaranan dan prasaranan keberlangsungan ekonomi, contohnya pembuatan jalan raya, listrik, irigasi, dan lain sebagainya. Peningkatan kualitas SDM, seperti kesehatan dan pendidikan. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, contohnya membangun perumahan. Pengembangan aparatur pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan.

c. Teori Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro

pengeluaran pemerintah secara mikro diartikan sebagi pengenluaran pemerintah yang ditujukan untuk menyetok barang public yang tidak terdapat pada swasta serta akibat terjadinya kegagalan *market*. Menurut Mangkosoebroto (1994:177-178) mikro ekonomi teori pemerintah memiliki tujuan untuk menganalisa factor-faktor yang membuat permintaan akan barang publik beserta

faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan barang publik. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk produk publik dapat menstimulus pengeluaran terhadap barang lainnya. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pengeluaran pemerintah diantaranya, seperti dibawah ini :

1) Perubahan permintaan barang publik

2) Perubahan aktifitas pemerintah dalam menghasilkan produk publik, serta perubahan dari gabungan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

3) Perubahan kualitas produk publik

4) Perubahan harga faktor- faktor produksi

d. Pengeluaran Pemerintah Secara Makro

Dilihat dari aspek makroekonomi, pengeluaran pemerintah ditujukan untuk menganalisa skala pemerintahan yang kemudian dapat dilihat transaksi anggaran, kebijakn public and perusahaan publik. Pengeluaran pemerintah yang ditujukan pada publik bersifat elastis dengan perkembangan ekonomi. Teori makro tentang pertumbuhan pemerintah terbagi atas tiga golongan (Mangkoesoeroto, 1994:169), diantaranya:

1) Development Model On The Development Of Government Spending

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave dimana model ini menghubung kan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan langkah-langkah pembangunan ekonomi. langakah awal

perkembangan ekonomi, yaitu investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pada tahap ini pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana, cobtohnya seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, transportation dan lain sebagainya. Langkah menengah pada pembangunan ekonomi, disini pemerintah masih berperan dan dibutuhkan, akan tetapi peranan invest swasta telah meningkat atau semakin besar. Peranan pemerintah harusla besar karena peran swasta yang makin banyak ini dapat membuat gagal pasar serta pemerintahan mesti menyiapkan barang public dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Pada langkah atau tahap tingkat ekonomi lanjut, kegiatan pemerintah dalam pem bangunan ekonomi bergerser ke p engeluaran atau output untuk kegiatan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya. Jika dihubungkan dengan hal tersebut maka Indonesia termasuk ke dalam ekonomi menengah dan masih dalam progress menuju Indonesia ekonomi lanjut.

2) Hukum Wagner

Wagner mengemukn teori tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar pada persentase terhadap GDP yang di dasarkan pula pada pengamatan di negara-negara Eropa, U.S dan Jepang. Hukum wagner berisikan jika pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Meningkatnya pengeluaran pemerintah akan memacu kegagalan pasar serta eksternality.. akan tetapi hukum Wagner memiliki kelemahan, dimana hokum tersebut

tidak di dasarkan pada teori tentang pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pemikirannya terhadap teori yang dikenal dengan organis terhadap pemerintah *(organic theory of the state)* yang menyatakan pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

3) Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman memaparkan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Di lain sisi masyarakat enggan untuk membayarkan pajak, ditambah lagi jika pajak terus dinaikkan. Perkembangan ekonomi membuat pemungutan pajak makin meningkat. Karena itu, pada keadaan normal meningkatnya GDP dapat membuat pendapatan pemerintah makin besar, hal terebut sejalan dengan pengeluaran pemerintah yang makin besar. Dikarenakan ada hal tertentu yang meng haruskan pemerintah memperbesar pengeluarannya, oleh sebab itu pemerintah memanfaatkan pajak sebagai jalan atau langkah untuk meningkatkan pendapatan negara. Apabila tariff pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan *(displacement effect)* yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi GDP serta pertumbuhan ekonomi suatu negara.

e. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan komposisi yang di perlukan dalam indeks kemiskinan. Pemerintah harus bisa menjamin hak masyarakt untuk sehat dengan memberikan fasilitas layanan kesehatan yang lengkap dan terjamin mutunya dengan biaya yang relatif murah agar bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat bahkan dari kalangan yang rendah.

Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusi, mendidik dan memberi pengatuahan berarti menggapai masa depan, dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya. Pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam mengatasi kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sosial ekonominya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

Infrastruktur merupakan roda penggerak ekonomi. Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang, dan jasa yang diangkut dari satu

tempat ke tempat lain di seluruh penjuru dunia. Perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ikhsan dalam T.W Krismanti (11) bahwa secara lansung pembangunan infrastruktur sendiri merupakan kegiatan produksi yang menciptakan output dan kesempatan kerja. Secara tidak lansung, ketersedian infrastruktur yang mempengaruhi perkembangan sektor-sektor ekonomi yang lain, terutama infrastruktur dasar yang memberikan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan infrastruktur lanjutan. Pada akhirnya perbaikan infrastruktur akan meningkatkan kondisi pembangunan. Meningkatnya kondisi pembangunan akan memberikan efek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu eksplorasi yang dilakukan pencipta, ini sangat mendasar untuk penelitian sebelumnya. Konsekuensi dari eksplorasi yang berlaku ini adalah bagian yang menggambarkan bayaran atau hasil masa lalu yang diidentifikasi dengan masalah yang sedang diselidiki.

Deris Desmawan (2016) memimpin investigasi berjudul Pemeriksaan Konsumsi Pemerintah di Daerah Pengarahan dan Kesejahteraan Terhadap Kemiskinan di Wilayah Lampung. Informasi yang digunakan adalah time series BPS Wilayah Lampung yang disusun dari tahun 1994-2013. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan pemerintah bersama dan seluruh masyarakat Lampung dalam pelatihan, kesejahteraan daerah

berpengaruh signifikan terhadap penurunan kuantitas kebutuhan di Daerah Lampung.

Naylal Fithri (2017) melakuan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah time series (susenas) yang berkala dari tahun 1999-2014. Penelitian ini menyatakan untuk variabel pengeluaran sektor pendidikan memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Jadi penelitian ini memiliki kesamaan dari penelitian terdahulu yaitu tentang pengeluaran pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan indikator yang berbeda, data yang berbeda, lokasi yang berbeda maupun waktu yang berbeda tetapi ada sebahagian variabel yang digunakan sama.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan menentukan presepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan rumusan masalah.

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis tentang pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur terhadap kemiskinan di Indonesia. Adapun variabel yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_2), pengeluaran pemerintah

sektor infrastruktur (X_3), sebagai variabel bebas dan kemiskinan (Y) sebagai variabel terikatnya.

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_1) berpengaruh negatif terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Jadi semakin tinggi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan akan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Sebaliknya, apabila pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berkurang maka kemiskinan akan meningkat sehingga dapat diketahui salah satu sektor yaitu kesehatan mempengaruihi terhadap kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_2) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Jadi semakin tinggi pengeluaran sektor pendidikan maka masyarakat miskin akan menurun. Sebaliknya, apabila pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berkurang maka kemiskinan akan meningkat. Sehingga dapat diketahui salah satu sektor yaitu pendidikan mempengaruhi kemiskinan. Karena pendidikan adalah hal pokok dalam meningkatkan taraf hidup seseorang untuk menuju masa depan.

Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur (X_3) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Jadi semakin tinggi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin sejahtera masyarak dan jauh dari kemiskinan. Sebaliknya, apabila anggaran yang dikelurkan menurun sehingga tidak efisiennya aktifitas masyarakat untuk menjangkau kebutuhan maka akan mendekat kepada kemiskinan. Sehingga dapat diketahui salah satu sekor yang

mempengaruhi kemiskinan adalah infrastruktur. Karena infrastruktur salah satu faktor penting dalam kegiatan perekonomian.

Dari variabel diatas dapat disimpulkan sementara bahwa variabel pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Gambaran umum dari kerangka berpikir sebagai berikut:

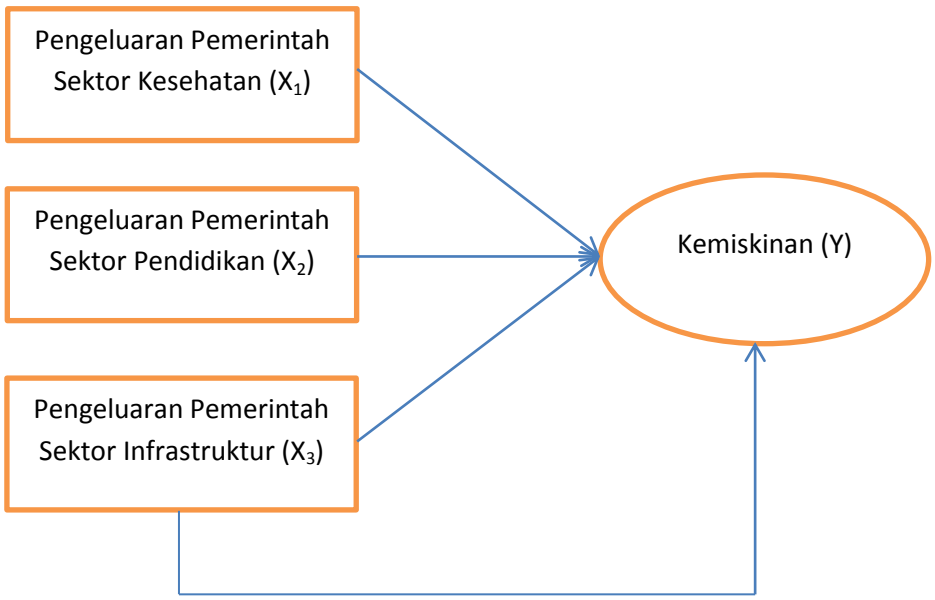

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan di Indonesia.

Dari kerangka konseptual di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini bermaksud mengetahui sejauhmana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka dikemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Adapun hipotesis yang di ajukan adalah:

1. Adanya kaitan yang signifikan dan negative antara pengeluaran pemerintah bagian sector kesehatan dengan kemiskinan di Indonesia

$H_0 : \beta_1 = 0$

$H_a : \beta_1 \neq 0$

2. Adanya kaitan yang signifikan dan negative antara pengeluaran pemerintah bagian sector pendidikan dengan kemiskinan di Indonesia

$H_0 : \beta_1 = 0$

$H_a : \beta_1 \neq 0$

3. Adanya kaitan yang signifikan dan negative antara pengeluaran pemerintah bagian sector infrastruktur dengan kemiskinan di Indonesia

$H_0 : \beta_1 = 0$

$H_a : \beta_1 \neq 0$

4. Adanya kaitan yang signifikan dan negative antara pengeluaran pemerintah bagian sector kesehatan,Pendidikan serta infrastruktur dengan kemiskinan di Indonesia.

$H_0 : \beta_1 = 0$

H_a : Salah satu $\beta_1 \neq 0$

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka didaptkan kesimpulan sebagai berikut :

1. pengeluaran pemerintah sector kesehatan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya ketika pengeluaran pemerintah sector kesehatan meningkat maka Jumlah kemiskinan di Indonesia akan menurun, begitu sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah sector kesehatan Menurun, maka Kemiskinan akan meningkat.
2. pengeluaran pemerintah sector pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya pengeluaran pemerintah sector pendidikan benar mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia, apabila pengeluaran pemerintah sector pendidikan meningkat maka jumlah kemiskinan di Indonesia akan menurun, begitu sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah sector pendidikan menurun, maka kemiskinan akan meningkat.
3. pengeluaran pemerintah sector infrastruktur berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya Pengeluaran pemerintah sector infrastruktur tidak mempengaruhi laju kemiskinan di Indonesia, berdasarkan analisis diketahui apabila pengeluaran pemerintah sector infrastruktur meningkat maka jumlah kemiskinan di Indonesia akan meningkat, begitu sebaliknya, jika pengeluaran

pemerintah sector infrastruktur menurun, maka kemiskinan akan menurun.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran keuangan di sector kesehatan, diharapkan dapat memperbaiki ataupun menambah akses dan fasilitas di bidang kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik untuk daerah terpencil, serta pemberian bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu agar dapat menikmati layanan kesehatan secara gratis. Pemerintah harus bijak dalam mengelola alokai keuangan untuk pembangunan manusia agar mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia.
2. Variabel pengeluaran pemerintah sector pendidikan memiliki nilai koefisien yang besar dari pada variabel pendidikan dan infrastruktur serta berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Diharapkan pemerintah meningkatkan pengeluaran di sector pendidikan dengan harapan dapat memperbaiki kualitas pendidikan hingga daerah terpencil, mulai dari bangunan, tenaga pengajar, hingga akses menuju sekolah, serta bantuan langsung untuk masyarakat kurang mampu.
3. Berdasarkan analisis diharapkan pemerintah lebih bijak dalam mengelola dan mengalokasikan pengeluaran untuk sector infrastruktur.

Diharapkan anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan dapat menciptakan lapangan kerja sehingga masyarakat terdidik rata-rata telah mendapatkan pekerjaan yang layak setelah masa pendidikan selesai. Pembangunan akses mobilisasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, serta pembangunan akses menuju fasilitas kesehatan dan disekolah harus lebih ditingkatkan agar dapat mencapai tujuan pembangunan nasional yang mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, G. C. (1998). *Sedimentation In The Modern and Miocene Mahakam Della.* Indonesia Petroleum Association.

Arifin, M.A.2015. Pengaruh pengeluaran Pemerintah Sektor kesehatan Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Bailey. (2001). *Industrial fat and oil product.* New York: Jhon Wiley & Sons.

Bulohlabna, C. (2008). *Tipologi dan pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.* Bogor: ITP.

Chriswardani, S. (2005). *Memahami kemiskinan secara Multidimensional.*

Ghozali, I. (2001). *Aplikasi anlisis multivariate dengan program spss.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. (1993). *Ekonometrika Dasar.* Jakarta: Erlangga.

Gujarati, D. (1998). *Ekonometrika Dasar.* Jakarta: Erlangga.

Jhingan, ML. 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Edisi Pertama. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kuncoro, M. (2007). *Otonomi dan Pembangunan Daerah.* Jakarta: Erlangga.

Lincolin Arsyad. 1999. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat, Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta.

Mangkoesoebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik.* Yogyakarta: UGM.